

# **Negara Pancasila dalam Persepsi Mayoritas Islam**

---

;

---

**Muhammad Salisul Khakim, S.IP., M.Sc.**

*Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*

**Judul**  
Negara Pancasila  
dalam Persepsi Mayoritas Islam

**ISBN: 978-602-0739-46-5**  
Cetakan Pertama, April 2020

**Penulis**  
Muhammad Salisul Khakim, S.IP., M.Sc.

**Penerbit**  
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta  
Jl. Siliwangi No. 63  
Sleman, Yogyakarta 55292

Telepon: (0274) 4469199  
Fax.: (0274) 4469204  
Email: [info@unisayogya.ac.id](mailto:info@unisayogya.ac.id)  
<https://www.unisayogya.ac.id>



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling bayak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penyusunan buku referensi ini yang berjudul “Negara Pancasila dalam Persepsi Mayoritas Islam”. Buku ini bermaksud untuk memberi gambaran dinamika bangsa dengan populasi mayoritas beragama Islam yang berideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai warga negara, kita perlu memahami falsafah perumusan dasar negara ini, sehingga setiap warga negara dapat bersikap bijak dalam menghadapi segala jenis tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan paham radikal dalam negara kontemporer saat ini menjadi perhatian terkait eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi pemikiran ini tidak lagi cukup dalam hal teori, akan tetapi dalam implementasi teknis politik Islam di tengah kepentingan nasional.

Organisasi masyarakat Islam semakin berkembang dengan pemikiran politiknya masing-masing, hingga berevolusi menjadi organisasi politik yang setara dengan negara. Hal ini sudah terjadi sejak lama, karena pengaruh Islam sangat kuat dalam perumusan dasar negara ini. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa pada realitanya, negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, hingga aliran kepercayaan lokal yang tidak bisa lepas dalam masa perjuangan kemerdekaan negara. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam yang besar dan bersikap moderat memiliki peran penting untuk membangun *role model*, sehingga orientasi pemikiran bangsa bukan lagi pada perdebatan ideologis, melainkan pada hal teknis dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, terutana untuk Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Press yang telah membantu menerbitkan Buku ini. Permohonan maaf penulis sampaikan pula apabila terdapat ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Penulis juga terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan buku ini kedepan.

Yogyakarta, Maret 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Pendahuluan</b>	
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	4
Tujuan Penelitian .....	4
<b>Metode Penelitian</b>	
Model Penelitian .....	6
Teknik Pengumpulan Data .....	6
Analisis Data .....	7
<b>Pembahasan Hasil Penelitian</b>	
Mayotitas Masyarakat Islam dalam Negara Pancasila .....	8
Implikasi Islam Populis dalam Negara Kesatuan .....	11
Islam Populis dalam Pergerakan Ormas Islam .....	13
Menghubungkan Politik Islam dan Negara .....	15
Moderasi Islam dalam perkembangan radikalisme .....	20
Peran Perguruan Tinggi terhadap Radikalisme .....	22
Gerakan Mahasiswa dalam Menyikapi Radikalisme .....	24
Analisis Strategi Deradikalisme Organisasi Kemahasiswaan .....	28
Ormas Islam dalam membangun persepsi Negara Pancasila .....	30

## **Penutup**

Kesimpulan .....	36
Rekomendasi .....	38
Daftar Pustaka .....	39

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas di negara Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membuat arah pergerakan bangsa yang cenderung lebih ke arah nilai-nilai yang bersifat Islami. Pada sisi lain, negara merangkul semua agama yang ada dengan menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar acuan bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional. Populisme masyarakat beragama Islam menjadi paham yang mengakui dan menjunjung kepentingan mayoritas masyarakat Islam. Hal ini membuat kepentingan nilai-nilai agama Islam perlu diakomodasi oleh negara dengan baik, yaitu dengan terus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak memunculkan gerakan-gerakan Islam garis keras yang menginginkan perubahan dasar negara secara radikal karena permasalahan ketidaksejahteraan.

### Latar Belakang

Populisme Islam adalah sebuah upaya membentuk artikulasi transformasi pelbagai identitas sosial politik Islam ke dalam satu identitas semi universal, yaitu umat. Konsep umat adalah *political frontier* atau batas akhir dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara. Identitas umat merupakan pelbagai variasi kelas, ras, etnis dileburkan (Widyanto, 2017: 1). Populisme ini merupakan bentuk persamaan dan persatuan umat Muslim Indonesia terhadap pemahaman kehidupan sosial dan politik dalam proses jalannya pemerintahan negara, yang terakumulasi dari keyakinan akan perubahan sistem tatanan negara yang lebih baik dengan berdasarkan sudut pandang nilai-nilai Islam.

Populisme dalam perspektif masyarakat yang beragama Islam nampak pada sikap ketidakpuasan terhadap elit politik negara dalam pengelolaan kebijakan yang tidak mendukung kehendak mayoritas. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara mengarahkan pada traumatik penyalahgunaan kekuasaan. Pengekangang terhadap organisasi masyarakat hingga intimidasi terhadap partai politik yang berbau Islam kuat. Sejarah menunjukkan legitimasi kekuasaan yang besar tidak selalu sebanding dengan kebebasan demokrasi dan kesejahteraan sosial. Pada masa kontemporer ini muncul tuntutan refleksi pada negara yang bukan hanya sekedar meninggikan Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan juga eksistensi ideologi tersebut dalam mewujudkan tujuan negara.

Trauma terhadap politik aliran dan kepemimpinan nasional yang tidak efektif, membuat rakyat lebih memilih pemimpin berbasis kinerja daripada ideologi. Meskipun simbol keislaman memainkan sentimen pemilih Muslim, namun selama yang ditawarkan bersifat normatif, maka hampir dipastikan

masyarakat tidak tertarik (Boy, 2013: 51). Masyarakat yang mulai terbuka dan terlibat aktif dalam partisipasi politik sekarang lebih cenderung berfikir kritis, setelah melalui proses pembelajaran politik pada era-era sebelumnya, sehingga lebih mengutamakan populisme yang memihak pada kepentingan rakyat. Kualitas dan kinerja dalam kepemimpinan yang konkrit menjadi daya tarik bagi masyarakat luas yang diharapkan menjadi tokoh panutan bagi elit pejabat lainnya.

Masa awal reformasi telah membuka keran kebebasan bagi munculnya berbagai ideologi dan pergerakan, beberapa kelompok radikal dengan mengatasnamakan demokrasi, telah memanfaatkan angin kebebasan ini untuk menunjukkan eksistensi dirinya di Indonesia (Darraz, 2013: 155). Gerakan demi gerakan masyarakat bermunculan dengan berbasis pada nilai-nilai Islam pun banyak bermunculan pasca runtuhnya Orde Baru, yang kemudian menyusup pada sistem pendidikan di Indonesia, dan mempengaruhi generasi muda sebagai sumber daya yang potensial dalam mobilisasi masa beskala besar. Masyarakat matoritas ini dalam negara demokrasi juga merasa berhak untuk menjalankan syariatnya dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada sisi lain terjadi pergesekan ideologis yang bahkan memunculkan perpecahan fisik.

Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia umumnya bersikap positif terhadap modernitas, namun kelompok garis keras justru bersikap reaksioner. Kelompok garis keras menganut paham absolutisme dan tidak berkompromi, intoleran terhadap berbagai sudut pandang, bahkan keragaman dianggap sebagai kontaminasi kebenaran yang diyakini (Wahid, 2009: 166). Radikalisme menjadi paham yang ekstrim karena bersifat tertutup dan tidak dapat menerima paham lain, sehingga hal ini menjadi bertentangan dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Media sosial dan media pendidikan menjadi tempat yang strategis untuk memobilisasi massa, untuk memodifikasi pergerakan menjadi lebih totaliter dengan dasar yang cukup ekstrim untuk merubah negara Pancasila menjadi negara agama.

Organisasi-organisasi masyarakat Islam yang besar seperti organisasi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia yang beranekaragam perspektif, untuk membangun persepsi integritas dari keberagaman identitas nasional. Organisasi-organisasi ini juga berpotensi dalam mempengaruhi perkembangan dan pembangunan bangsa sejak sebelum merdeka hingga sekarang. Namun organisasi-organisasi ini sendiri mulai mendapat pengaruh dari dalam maupun dari luar, karena faktor perkembangan zaman yang pengaruh kepentingan pribadi para tokoh dan kader di dalamnya. Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi populer di Indonesia, dengan memiliki banyak kader dari seluruh populasi

yang ada di negara ini. Dengan demikian, persepsi dari jumlah populasi mayoritas tersebut memiliki pengaruh besar dalam memahami dasar dan arah tujuan bangsa dengan ideologi Pancasila. Terdapat diskursus ideologis yang perlu dikelola dengan baik dalam menyatukan pandangan pemikiran nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang dimiliki oleh populasi mayoritas tersebut.

Muhammadiyah dapat menjadi acuan bagi salah satu organisasi masyarakat Islam lainnya dalam menghadapi permasalahan di atas, yaitu penegasan bahwa Pancasila dan Islam bukan merupakan suatu pertentangan. Organisasi yang sudah berdiri lebih dari satu abad tersebut memiliki integritas yang kuat dalam membangun bangsa, yang ditunjukkan pada hasil Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015 lalu yang mengusung konsep “Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*”. Integritas organisasi ini menunjukkan bahwa jati dirinya menjadi bagian dari ideologi bangsa yang masih diyakini hingga sampai saat ini, yaitu dengan mewujudkan *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, yang sejalan dengan sila kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi masyarakat Islam ini sebagai organisasi bersifat modernis dan reformis, sehingga perlu memperjelas integritas jati dirinya sebagai persyarikatan yang tidak berseberangan atau bertentangan dengan identitas dasar negara, terlebih lagi dalam maksud untuk membuat negara berdasarkan syariat Islam. Organisasi ini mencoba menempatkan diri pada kaum intelektual muslim yang nasionalis, artinya lebih kepada pembangunan identitas *Islamic society* dan bukan pembangunan *Islamic state*.

Sementara itu, NU sebagai organisasi masyarakat Islam populis juga menegaskan dirinya yang sejalan dengan ideologi Pancasila, dengan mengangkat istilah Islam Nusantara. Pada diskusi Pra-Muktamar ke-33 NU di Makassar pada 2015 (nu.or.id), Islam Nusantara dijelaskan sebagai sesuatu yang empirik dan distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia. Islam bersumber satu dan bersifat ilahiyah, akan tetapi harus diperhatikan bahwa Islam juga terealisasi dalam praktik keseharian. Artinya, selain ilahiyah, Islam juga bersifat insaniyah. Dengan demikian, jika terdapat Islam Nusantara, maka terdapat juga fiqih Nusantara, yaitu paham dan prespektif keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika teks-teks syariat dan budaya di daerah setempat.

Upaya yang dilakukan organisasi masyarakat Islam ini dilakukan sebagai untuk mewujudkan rekonsiliasi gerakan pembaruan, sehingga menciptakan kondisi yang dinamis dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari perspektif rekonsiliasi gerakan pembaruan, menurut Effendy (2011: 195), pernyataan-pernyataan intelektual aliran transformasi



sosial lebih kompleks dan karenanya juga lebih sulit dipaparkan. Kompleksitasnya terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi kepada masyarakat. Kompleksitas juga terletak pada nada politisnya yang tampak mengarah kepada pembentukan masyarakat yang kuat *vis a vis* negara, dan tidak sekadar diarahkan kepada proses rekonsiliasi politik antara Islam dan negara.

Permasalahan di atas merupakan representatif dari permasalahan yang bersifat nasional, yang memiliki mayoritas populasi masyarakat beragama Islam yang di dalamnya juga terbagi kedalam organisasi-organisasi masyarakat yang beragama Islam dengan corak pemikiran yang beragam pula. Masyarakat mayoritas muslim tidak serta merta selalu sejalan dengan pemikiran bangsa dalam berideologi Pancasila, kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang telah terbagi ke dalam berbagai pergerakan atau organisasi masyarakat hingga ke arah politik, telah membuat dikotomi pemikiran fundamental dalam mewujudkan tujuan negara. Pada sisi lain, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mencoba menjamin kebebasan berfikir dan bertindak bagi masyarakat menjadi tidak terkendali, bahkan ke arah yang bertentangan dengan prinsip negara.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan dari buku ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu terkait dengan bagaimana pengaruh Islam dalam pembangunan dasar negara Indonesia? Bagaimana pengaruh Islam dalam perkembangan negara yang kontemporer? Kemudian juga mengkaitkan dengan bagaimana peran Muhammadiyah sebagai Organisasi Masyarakat Islam dalam membangun persepsi Negara Pancasila? Rumusan masalah inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam buku ini.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam buku ini meliputi beberapa hal, yaitu memahami pengaruh Islam Populis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; memahami moderasi Islam dalam perkembangan radikalisme di negara kontemporer; serta memahami peran Muhammadiyah sebagai Organisasi Masyarakat Islam dalam membangun persepsi Negara Pancasila.

Pendahuluan di atas menjadi gambaran urgensi yang tidak hanya mempersoalkan pemikiran belaka, akan tetapi tindakan negara dalam

mengambil langkah dan mewujudkan tujuan negara menjadi perdebatan dari dikotomi pemikiran di atas. Kesepemahaman dari setiap masyarakat yang mayoritas Islam juga tergantung dari persepsi pemikiran elit organisasi masyarakat itu sendiri, kepentingan tentu bermain dalam pengambilan setiap keputusan dan sikap untuk bernegara. Setiap perselisihan ini tentu terdapat benang merah yang saling terhubung antara kepentingan negara dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengurai permasalahan tersebut untuk menemukan jalan pemikiran persepsi yang berseberangan dalam mewujudkan tujuan negara ini ke dalam buku ini.

Pendahuluan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di bangsa ini berupa kondisi yang kontradiktif, dikarenakan persepsi masyarakat Indonesia yang belum memahami bahwa ideologi Pancasila memiliki filsafat dan nilai yang sejalan dengan Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam pun telah terbagi-bagi ke dalam berbagai jenis organisasi masyarakat Islam yang memiliki latar belakang beragam. Hal ini mengakibatkan persepsi setiap masyarakat berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara.

Fenomena radikalisme berkamufle dalam berbagai pergerakan dan media sosial dan pendidikan di tanah air. Identifikasi yang ditemukan dari latar belakang diatas adalah potensi mudarnya integritas nasional sebagai akibat tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan melemahnya semangat nasionalisme ini mengancam disintegrasi bangsa. Peran mayoritas masyarakat yang beragama Islam sangat penting dalam mengelola situasi ini, yaitu terkait bagaimana politik negara tetap bisa sejalan dengan politik kepentingan mayoritas tersebut. Dengan demikian, hasil dari identifikasi ini memerlukan pendalaman kajian untuk menemukan solusi dengan gagasan yang idealis namun realistis untuk diimplementasikan.

## **METODE PENELITIAN**

Buku hasil penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat, dan kemudian dibuat rumusan masalah untuk dapat mencari solusi jawaban atas permasalahan tersebut. Rumusan masalah ini mencoba untuk menggali persepsi masyarakat terkait konsep Negara Pancasila di tengah mayoritas orang yang beragama Islam. Tahap penelitian selanjutnya menentukan metode penelitian yang meliputi penentuan obyek penelitian, menentukan model penelitian, teknik pengumpulan data, hingga analisis data penelitian.

### **Model Penelitian**

Penelitian dalam buku ini menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2012: 6). Pendekatan kualitatif ini dijelaskan dengan metode deskriptif, yang diartikan menurut Nawawi (2012: 67) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Model penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap situasi dan kondisi perkembangan yang telah dan sedang terjadi hingga saat ini, seperti peristiwa perekrutan organisasi-organisasi Islam yang radikal seperti Hisbut Tahrir Indonesia maupun organisasi yang berembrio sebagai Negara Islam Indonesia, hingga perkembangan peristiwa 212 di Jakarta yang telah banyak menyatukan umat Islam sebagai kaum populis yang mayoritas dalam mengusung latar belakang politik identitas untuk kepentingan politik pemerintah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam buku referensi hasil penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada sumber primer dan sekunder, dengan menentukan informan penelitian yang representatif sesuai dengan obyek penelitian. Menurut Moleong (2012: 157), data primer bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan dengan upaya kegiatan melihat, mendengar dan bertanya, yang dilakukan pada obyek penelitian. Data sekunder bersumber dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi terkait dengan eksistensi negara dengan ideologi Pancasila di tengah upaya kaum masyarakat Islam populis dalam memperjuangkan politik identitas ke-Islaman dan kenegaraan. Sementara itu,

menurut Nawawi (2012:167) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian disebut sebagai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel atau informan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut. Teknik ini menentukan bahwa informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini meliputi organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, termasuk unit-unit organisasi seperti amal usaha pendidikan tinggi Muhammadiyah.

### **Analisis Data**

Analisis data dari data yang telah diperoleh melalui proses penelitian di atas selanjutnya ditindaklanjuti dengan analisis data, agar data-data terkait eksistensi negara dengan ideologi Pancasila di tengah upaya kaum masyarakat Islam poulis dalam memperjuangkan politik identitas ke-Islaman dan kenegaraan dapat bersifat objektif. Analisis data, menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam Ulber (2010: 339), mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan, pertama yaitu reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di tangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kedua, menarik Kesimpulan, yaitu verifikasi sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Data eksistensi negara dengan ideologi Pancasila di tengah upaya kaum masyarakat Islam poulis dalam memperjuangkan politik identitas ke-Islaman dan kenegaraan, selanjutnya dilakukan uji keabsahan data, agar data yang telah diolah dapat diujikan kebenarannya dan tidak bersifat manipulatif ataupun subyektif. Uji keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan teknik triangulasi. Moleong (2012: 330) menjelaskan bahwa Triangulasi menjadi cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada waktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Sejarah kebangsaan negara Indonesia dengan konstruksi ideologi Pancasila telah mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran dan perjuangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan bangsa Indonesia juga telah banyak dibentuk dari berbagai kalangan atau golongan masyarakat, baik yang memiliki pemikiran nasionalis, islamis, dan komunis/sosialis. Abdillah (2011: 140) berpendapat bahwa dalam sejarah Indonesia kontemporer cendekiawan, termasuk cendekiawan muslim, memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Pada masa persiapan kemerdekaan sampai akhir 1950-an hampir semua cendekiawan bahkan ikut dalam kegiatan politik. Karena keterlibatan mereka dalam dunia politik didukung baik oleh faktor internal maupun eksternal dan mereka pun dapat mengekspresikan idealisme mereka dengan bebas, maka keterlibatan mereka itu dinilai sebagai hal yang sangat positif dan bahkan merupakan tuntutan sejarah. Keberlanjutan dengan peristiwa tersebut pada era orde baru, Umar (2016: 12) menjelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 memaksa Soeharto untuk turun dari kekuasaannya setelah 32 tahun berkuasa, sekaligus melahirkan krisis hegemoni di Indonesia. Dengan jatuhnya Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi menjadi asas tunggal dan sesuatu yang sakral, kendati masih dipertahankan sebagai dasar negara. Jatuhnya Orde Baru kemudian melahirkan kontestasi hegemonik baru atas makna Islam. Dengan tidak ada lagi asas tunggal Pancasila, Islamisme kembali mampu menampilkan dirinya di pentas politik nasional.

### **Mayoritas Masyarakat Islam dalam Negara Pancasila**

Politik pemerintahan negara Islam masuk dalam konstitusi negara dengan posisi yang sejajar dengan politik yang digunakan oleh rezim pemerintahan, kedua hal ini menjadi semakin kuat dengan masuknya para tokoh-tokoh muslim yang juga memegang kekuasaan, namun bukan maksud untuk menjatuhkan ideologi yang sudah lama dijadikan dasar negara. Effendy (2011: 182) mengungkapkan bahwa pandangan intelektual muslim aliran pembaruan teleologis, memandang Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadapan dengan negara. Dalam hal ini, yang khususnya sangat penting adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Melainkan, keduanya harus dipandang sebagai saling melengkapi. Pandangan khusus ini tumbuh dari pemahaman religio-politik bahwa tiap sila dalam Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial) sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah menurut Nashir (2007: 20-21) dapat dikatakan juga memiliki pemahaman intelektual muslim yang mengarah pada pembaruan, yang bersifat reformis dan modernis, sehingga persyarikatan ini mendukung penuh Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Muhammadiyah memerlukan kristalisasi dalam substansinya, yakni memahami kandungan isi ideologi tersebut, setelah itu dilakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan dan menanamkannya dalam kesadaran dan alam pikiran seluruh anggota, dan lebih jauh lagi menjadikan sebagai landasan idealisme, pemikiran, dan langkah dalam seluruh gerak Muhammadiyah secara kelembagaan.

Dalam konteks organisasi masyarakat Islam, Nashir (2007: 22-23) juga mengungkapkan bahwa revitalisasi ideologi Muhammadiyah diperlukan karena secara faktual terdapat masalah-masalah yang bersifat ideologis. Pertama, yaitu karena melemahnya pemahaman mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam berbagai aspek yang mendasar sehingga kehilangan arah dan komitmen dalam ber-Muhammadiyah. Kedua, gejala melemahnya spirit, militansi, identitas, dan visi gerakan pada bagian anggota persyarikatan. Ketiga, gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan, dan kepentingan Muhammadiyah. Keempat, melemahnya solidaritas kolektif yang ditandai kurangnya ukhuwah, silaturahmi, dan sinergi antar anggota. Kelima, menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan persyarikatan. Keenam, kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah yang menyebabkan tidak sebandingnya jumlah anggota yang berkiprah untuk persyarikatan serta kurang tergarapnya usaha-usaha persyarikatan secara optimal. Ketujuh, semakin mudahnya berbagai paham pemikiran dari luar yang masuk ke dalam Muhammadiyah yang dapat melemahkan karakter khusus Muhammadiyah ketika tidak diiringi dengan peneguhan ideologis yang menyangkut paham dan sistem perjuangan Muhammadiyah.

Berkaitan dengan hal ini, Bayuni (2010: 60), yang memandang bahwa Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat Muslim di tanah air menyongsong kehidupan modern/urban. Ia merupakan kekuatan progresif tapi tidak radikal dalam tindakan, walaupun pemikiran-pemikirannya mungkin dianggap revolusioner untuk ukuran saat itu. Ia menjalankan misi perubahan bukan melalui revolusi fisik atau mengandalkan kekerasan, melainkan melalui gerakan dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berorientasi pada agenda-agenda pembaruan, menurut Muhtadi (2010: 52) sejatinya selalu meninjau ulang rumusan ajaran Islam, baik dalam wilayah *mahdlah* maupun

*ghair mahdlah*. Peninjauan ulang ini dimaksudkan untuk menakar relevansi serta kesanggupan para pemeluk Islam untuk melaksanakan setiap tuntutan ajaran sesuai dengan realitas yang dihadapi.

Perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari menjadi realitas sekaligus tuntutan bagi setiap individu untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan, yang perlu diaktualisasikan tanpa menghilangkan nilai atau ajaran Islam secara murni dan sikap organisasi Muhammadiyah yang reformis. Salah satu bidang utama yang seharusnya menjadi *strategic themes* dari pembaruan di tubuh Muhammadiyah di masa mendatang, menurut Sudhamek (2010: 66-67) adalah bidang pendidikan, dengan merawat semua yang telah ada dan dibesarkan. Hanya saja kiprah di bidang pendidikan tidak cukup hanya menekankan pada sisi akademis (*academic excellence*) tapi juga pada saat yang bersamaan sebuah lembaga pendidikan itu harus juga mengembangkan aspek karakter dari anak didiknya (*character building*). Pendidikan itu perlu dipandang sebagai sebuah industri yang harus dikelola dengan profesional dan dengan paradigma baru. Dengan demikian, perlu dikembangkan sebuah kurikulum dan metodologi yang pas dan sesuai untuk memastikan dua aspek tersebut tergarap secara sekaligus.

Nashir (2014: 61-62) berpendapat bahwa ideologi Muhammadiyah memiliki karakter reformis modernis dan Islam yang berkemajuan, yaitu perpaduan antara pemurnian dan pengembangan yang bersifat tengahan atau moderat dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam, sehingga senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban. Ideologi ini memadukan nilai-nilai Islam yang substantif (esensi, isi) dan wadah (struktur, rukun) antara teks dan konteks, antara pemurnian dan pengembangan; serta menyatukan seluruh dimensi ajaran Islam (aqidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah) ke dalam kesatuan sistem ajaran yang harus diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nashir (2014: 65) juga menegaskan bahwa Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional (*dar al-ahdi*) dan lahan berdakwah serta bertajdid (*dar al-syahadah*) sejalan misi utama Muhammadiyah. Hal yang paling penting ialah agar negara Indonesia terus diusahakan selalu dijiwai, dibingkai, dipengaruhi, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur agama sehingga menjadi *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Arif dan Aulia (2017: 212) juga berpendapat bahwa Muhammadiyah dan warganya sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk tetap menjaga *agreement* pendiri bangsa. Komitmen dari Muhammadiyah harus terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan membangun dan memajukan bangsa, seperti dalam bentuk peran serta melalui kegiatan-kegiatan dalam amal usaha Muhammadiyah, serta terlibat dalam hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan.

## Implikasi Islam Populis dalam Negara Kesatuan

Islam sebagai agama yang diakui di negara yang mayoritas populasinya adalah Muslim ini membuat arah pergerakan masyarakat lebih cenderung ke arah nilai-nilai yang bersifat islami, walaupun pada sisi yang lain terdapat ideologi negara yang berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan nasional. Populisme sebagai paham yang mengakui dan menjunjung kepentingan mayoritas masyarakat, membuat kepentingan ajaran-ajaran agama Islam perlu diakomodasi oleh negara. Hal tersebut membuat munculnya gerakan-gerakan Islam populistis yang memperjuangkan kepentingan dan haknya dalam berbangsa dan bernegara.

Populisme Islam adalah sebuah upaya membentuk artikulasi transformasi pelbagai identitas sosial politik Islam ke dalam satu identitas semi universal, yaitu umat. Konsep umat adalah *political frontier* atau batas akhir dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara. Identitas umat merupakan pelbagai variasi kelas, ras, etnis dileburkan (Widyanto, 2017: 1). Populisme ini merupakan bentuk persamaan dan persatuan umat Muslim Indonesia terhadap pemahaman kehidupan sosial dan politik dalam proses jalannya pemerintahan negara, yang terakumulasi dari keyakinan akan perubahan sistem tatanan negara yang lebih baik dengan berdasarkan sudut pandang nilai-nilai Islam.

Makna paham populistis dalam perspektis Islam muncul sebagai sikap ketidakpuasan terhadap elit politik negara dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat Muslim. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara menjadikan ketakutan dan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membuat masyarakat merasa perlu untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan negara, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi bahkan menggantikan sistem pemerintahan tersebut.

Dampak traumatis terhadap politik aliran dan kepemimpinan nasional yang tidak efektif, membuat rakyat lebih memilih pemimpin berbasis kinerja daripada ideologi. Meskipun simbol keislaman memainkan sentimen pemilih Muslim, namun selama yang ditawarkan bersifat normatif, maka hampir dipastikan masyarakat tidak tertarik (Boy, 2017: 51). Masyarakat yang mulai terbuka dan terlibat aktif dalam partisipasi politik sekarang lebih cenderung berfikir kritis, setelah melalui proses pembelajaran politik pada era-era sebelumnya, sehingga lebih mengutamakan populisme yang memihak pada kepentingan rakyat. Kualitas dan kinerja dalam kepemimpinan yang konkrit menjadi daya tarik bagi masyarakat luas yang diharapkan menjadi tokoh panutan bagi elit pejabat lainnya. Basis sosial dalam kontekstualisasi situasi ini di Indonesia dapat bercermin dari faktor sejarah, yaitu antara Muslim



nasionalis dengan Muslim religius dalam memperdebatkan dasar negara menjelang proklamasi kemerdekaan. Kedua golongan ini saling mempertahankan argumentasinya dalam menjaga komitmen dan keyakinan agama yang akan diterapkan sebagai pondasi tatanan negara. Peristiwa tersebut saat ini seakan muncul kembali dengan momentum yang lebih pada menjaga konsistensi negara dalam menjalankan ideologinya, serta mengevaluasi jalannya pemerintahan negara yang ditakutkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya cenderung otoriter dan korup. Populisme Islam ini dapat dikatakan sebagai bentuk frustrasi politik Islam di tengah sistem demokrasi formal yang memiliki banyak catatan negatif dalam perjalanan sejarah, hingga pada akhirnya berkembang dan memunculkan kompetisi politik kontemporer yang bersaing dengan mengandalkan isu kepemimpinan populis, yaitu dengan basis jumlah masa yang besar dan berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

Gaya kepemimpinan dengan corak populis merupakan pemimpin yang memiliki kriteria utama yang keputusan adalah suara nyata atau suara yang diharapkan rakyat. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan oportunistik, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin pelayan, melayani apa yang orang ingin lakukan (Stückelberger, 2014: 195). Prinsip kepemimpinan populis ini dapat menjadi menjadi jalan tengah terhadap perdebatan politik Islam dengan negara, sehingga menjadi bentuk rekonsiliasi bagi pergerakan masyarakat ataupun organisasi yang berasaskan pada nilai-nilai Islam murni yang juga aktif dalam membangun peradaban bangsa. Dilihat dari perspektif rekonsiliasi gerakan pembaruan, pernyataan-pernyataan intelektual aliran transformasi sosial lebih kompleks. Kompleksitasnya terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi masyarakat, serta pada nada politis yang tampak mengarahkan pembentukan masyarakat yang *vis a vis* negara (Effendy, 2011: 195). Agenda yang menitikberatkan pada masyarakat luas menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk diperjuangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat yang terkotak-kotakkan dalam dinamika perkembangan politik saat ini, bahkan seolah-olah terdapat dua pihak yang saling berhadap-hadapan dalam mencapai tujuannya masing-masing.

Pemahaman dan pandangan tersendiri terhadap kajian permasalahan politik negara, serta masing-masing pihak juga memiliki basis masyarakat dalam jumlah besar yang terdiri dari berbagai kalangan. Belum lagi jika berbicara masyarakat lain di luar pihak yang saling berhadap-hadapan ini, semuanya memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kepentingannya untuk diakomodasikan dalam negara, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ideologi dan kepentingan negara itu sendiri. Pergerakan Islam populis dalam hal ini menjadi jalan tengah untuk menghubungkan atau mengimplikasikan politik masyarakat Muslim yang mayoritas dengan kepentingan politik negara.

## Islam Populis dalam Pergerakan Ormas Islam

Pasca era Reformasi yang telah membuka keran kebebasan bagi munculnya berbagai ideologi dan pergerakan, beberapa kelompok radikal dengan mengatasnamakan demokrasi, telah memanfaatkan angin kebebasan ini untuk menunjukkan eksistensi dirinya di Indonesia (Darraz, 2013: 155). Gerakan-gerakan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam banyak bermunculan pasca runtuhnya orde baru, karena masyarakat Muslim sebagai populasi terbesar di negara ini merasa memiliki kebebasan dan hak demokrasi untuk menjalankan syariatnya dalam negara. Atas nama rakyat pergerakan demi pergerakan semakin bebas berkembang dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat gerakan-gerakan yang bermunculan tersebut memiliki paham yang berhadapan dengan negara.

Implikasi Islam populis dalam negara dapat dilihat dari hubungan pergerakan politik Islam dengan negara. Pergerakan politik Islam yang berkembang dari masyarakat juga perlu diklasifikasi, karena perbedaan paham masyarakat akan menimbulkan kemungkinan bentuk pergerakan yang berbeda pula. Pada satu sisi gerakan Islam populis yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat mayoritas dengan pemahaman yang fanatik dan arah pergerakan fundamental, akan memunculkan gerakan-gerakan yang keras dan radikal. Pada sisi yang lain, hal tersebut tentu berbeda dengan gerakan Islam populis yang juga mengatasnamakan kepentingan rakyat, namun bersifat modernis dan reformis tanpa meninggalkan nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Pergerakan Islam populis ini cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan bersifat toleran, serta menggunakan pemahaman agama untuk kepentingan masyarakat secara luas dalam negara. Populisme Kanan sebagai gerakan oposisional mengancam negara hukum demokratis. Pada sisi sistem politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum dengan menekan parlemen, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan. Pada sisi masyarakat, warga mereka meracuni ruang publik dengan *ressentiment* terhadap *elite*, minoritas maupun pendatang (Hardiman, 2017: 1). Bentuk ancaman dari oposisi pemikiran Kanan yang identik dengan agama Islam ini memang dapat membuat kekacauan dalam sistem perpolitikan negara dan sistem sosial masyarakat, namun dalam kenyataan negara demokrasi hal ini bukan tidak mungkin menjadi bahan evaluasi, artinya modernisasi dapat berjalan beriringan dengan gerakan Islam yang populis tanpa harus saling menjatuhkan.

Masyarakat yang beragama Islam Indonesia umumnya bersikap positif terhadap modernitas, namun kelompok garis keras justru bersikap reaksioner. Kelompok garis keras menganut paham absolutisme dan tidak berkompromi,

intoleran terhadap berbagai sudut pandang, bahkan keragaman dianggap sebagai kontaminasi kebenaran yang diyakini (Wahid, 2009: 55).

Pergerakan dengan paham fundamental dan radikal di negara ini tentu tidak dapat diterima, termasuk juga sistem khilafah. Gerakan tersebut tidak toleran dan tidak dapat menerima perbedaan, padahal negara ini kaya akan keanekaragaman budaya dan bersifat plural. Dengan demikian, gerakan pembaruan yang bermaksud untuk menjaga nilai-nilai Islam dan mempertahankan kemurnian ajaran agama tersebut perlu dimodifikasi agar dapat bersifat populis dan sejalan dengan ideologi negara. Pembaruan memang hampir selalu berimplikasi pada semangat pembebasan dan demokratisasi. Tetapi menumbangkan kekuasaan formal bukanlah satu-satunya pilihan yang harus ditempuh, walaupun mayoritas memanfaatkan peluang tersebut, hal itu merupakan keniscayaan sejarah yang sulit dihindari. Sebab pembaruan sendiri bertujuan menawarkan pendekatan-pendekatan yang lebih rasional, dengan konsekuensi yang selalu berhadapan dengan hal-hal yang irrasional (Muhtadi, 2010: 51). Kedua hal yang berbeda tersebut menunjukkan perlu adanya sinergi antara politik Islam populis dengan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pola pendekatan untuk membentuk sinergi tersebut harus mengutamakan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai modal dasar berfikir dan bersikap dari sisi irrasional, hingga mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif dari sisi rasional. Hal mendasar lain yang dapat mewujudkan kesejahteraan negara tersebut juga perlu diimbangi nilai kemanusiaan dan semangat persatuan yang dijalankan secara demokratis dan bijaksana. Pergerakan Islam populis yang terlibat dalam politik negara perlu memiliki dasar pendirian yang tegas dengan tujuan yang jelas, serta menjadi pergerakan yang terstruktur dengan dinamika yang visioner. Dasar pergerakan sebagai organisasi masyarakat yang mayoritas Muslim tentu tidak dapat berhadapan dengan ideologi negara jika ingin tetap eksis dan berkembang, serta tujuan yang ingin dicapai juga harus sejalan kepentingan negara, bukan hanya kepentingan kelompok atau organisasi tertentu saja.

Pergerakan masyarakat yang beragama Islam yang bersifat populis di negara ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan gerakan tersebut juga menjadi bagian cikal bakal perwujudan kebebasan dari penjajah, baik merdeka dari segi pendidikan, sosial hingga kedaulatan negara. Muhammadiyah dalam hal ini menjadi salah satu organisasi besar yang dapat dikatakan bersifat Islam populis, karena keberadaannya dilatarbelakangi oleh perjuangan masyarakat Muslim yang merakyat dan menginginkan kesejahteraan bersama. Pergerakan ini mampu mengimbangi perkembangan dinamika pemerintahan hingga era global saat ini, tanpa membuat pertentangan atau perlawanan terhadap kepentingan negara. Sementara itu,

NU sebagai organisasi masyarakat Islam populis juga menegaskan dirinya yang sejalan dengan ideologi Pancasila, dengan mengangkat istilah Islam Nusantara, yaitu sebagai sesuatu yang empirik dan distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia.

## **Menghubungkan Politik Islam dan Negara**

Keberadaan umat Islam di Indonesia sejak awal telah memiliki sistem politik demokrasi, yang merupakan mekanisme politik yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Nahdlatu Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam populis menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemaslahatan umat, sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Nahdlatu Ulama Pasal 8 ayat 2 yang berisi Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah waljamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta (Salim: 2015, 1).

Sementara itu, golongan modernis menjadi pembela-pembela demokrasi yang teguh dalam menentang gerakan politik otoritarian (Maarif, 2006: 127). Sistem politik demokrasi telah menjadi bagian dalam perjuangan masyarakat Islam populis dalam perkembangannya, dan pergerakan masyarakat yang cenderung bersifat modernis tersebut akan lebih dinamis dalam proses berbangsa dan bernegara, tanpa perlu membuat perdebatan dan perpecahan yang saling menjatuhkan, baik dengan pergerakan masyarakat lain maupun dengan pemerintahan negara itu sendiri. Organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat Muslim di tanah air menyongsong kehidupan modern. Organisasi ini merupakan kekuatan progresif yang tidak radikal, walaupun pemikirannya dianggap revolusioner dalam gerakan-gerakan dakwah dan pendidikan (Bayuni, 2010: 60).

Perkembangan dan kemajuan negara yang bersifat dinamis menuntut setiap masyarakat dan pergerakannya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi nasional dan global. Muhammadiyah dalam hal ini telah mempersiapkan masyarakat Muslim dalam mengikuti kehidupan modern yang dikuatkan dengan gerakan pembaruan atau purifikasi, artinya tuntutan peradaban yang selalu berkembang dan berkemajuan selalu diimbangi dengan nilai-nilai Islam yang sudah ada sejak dahulu sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pergerakan ini dapat dikatakan menjadi organisasi masyarakat yang

populis, karena gerakannya yang selalu bersumber dan didukung oleh kepentingan masyarakat luas. Muhammadiyah juga menjadi kekuatan umat Islam dalam memperluas konsep umat menuju *citizenship*, yang memungkinkan untuk merangkul kelas borjuasi yang berasal dari etnis minoritas. Hal ini karena metode dakwah dan pendidikan yang dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh organisasi ini mampu membangun komitmen dan kepercayaan masyarakat, yang terstruktur mulai dari level pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa.

Kontribusi pembangunan negara dari pusat hingga daerah ditunjukkan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk berbaur dan bergabung. Sementara itu, pembangunan lembaga rumah sakit, lembaga perekonomian, serta lembaga atau amal usaha lainnya dalam organisasi ini telah menyentuh hati masyarakat luas dan mendasari pergerakan Islam yang bersifat populis. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya semata-mata membangun kepentingan agama dari sisi akhirat saja, melainkan juga kepentingan masyarakat secara duniawi sebagai jalan kepentingan bersama dalam mewujudkan negara yang baik dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan organisasi yang lebih dari satu abad berdiri ini juga telah menunjukkan kontribusi besar terhadap pembangunan peradaban bangsa dan negara, serta menjadi teladan bagi pergerakan masyarakat lainnya dalam menjaga konsistensi dan mewujudkan visinya.

Muhammadiyah bukan satu-satunya organisasi yang melakukan pembaruan dalam Islam, karena Indonesia merupakan konteks salah satu takaran utama untuk melihat konsistensi gerakan, baik konsisten dalam pemribumian dan penzamanan maupun konsisten dari sisi sejarah yang dilaluinya sejak awal hingga saat ini (Muhtadi, 2010: 44).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dinamika negara demokrasi ini memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan golongan, termasuk banyak organisasi pergerakan yang menjadi media masyarakat dalam mengaktualisasikan kepentingan individu, kelompok, hingga kepentingan negara. Corak keberagaman organisasi menjadi keniscayaan dalam negara yang plural ini. Selama pergerakan tersebut dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta memiliki dasar dan acuan yang sama berdasarkan pada ideologi negara, maka pergerakan lainnya pun menjadi suatu hal yang saling melengkapi kekurangan dan kelemahan satu sama lain. Begitu juga halnya dengan organisasi besar selain Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama yang juga dapat dikatakan merupakan gerakan Islam populis karena jumlah anggotanya yang sangat banyak dan terdapat hingga pelosok-pelosok daerah, dengan dengan gaya pergerakan yang cenderung kepada arah tradisionalisme yang sudah ada di nusantara sejak dahulu.

Revitalisasi tradisionalisme agama diperlukan dalam bentuk memasukkan unsur-unsur rasional ke dalamnya, hingga modernisme agama itu sendiri dapat dirasakan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradisionalisme agama populis (Wahid, 2006: 37). Kedua organisasi yang memiliki arah pergerakan dan kecenderungan tradisionalisme dan modernism tersebut menjadi suatu sinergi yang harmonis dalam membangun negara. Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berdiri lebih awal dalam hal ini juga perlu terbuka dan belajar dari berbagai kalangan dan kelompok masyarakat Muslim lainnya dalam memperbaiki diri untuk terus berkembang dan berkemajuan.

Gerakan ini tetap perlu melakukan refleksi dalam revitalisasi dan reaktualisasi ideologi pergerakan agar dapat berkomitmen dan berkelanjutan dalam membangun persyarikatan dan negara, serta perlu membangun dan mengembangkan pemikiran Muhammadiyah secara lebih luas dan mendalam kepada masyarakat sebagai basis pergerakan Islam populis. Langkah revitalisasi ideologi Muhammadiyah dilakukan dengan memantapkan arah dan langkah sebagai gerakan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah dan *tajdid*, serta tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat bergerak leluasa ke segala penjuru dan golongan masyarakat (Nashir, 2016: 217). Membangun pergerakan Islam yang populis dalam artian positif membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah kuantitas yang besar, dengan melakukan dan menghasilkan kegiatan yang berkualitas, yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan masyarakat secara luas itu sendiri.

Organisasi masyarakat Islam dengan pergerakan dakwah dan *tajdid* menjadikan organisasi masyarakat Muslim ini diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, karena sifatnya yang merakyat serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim dalam perpolitikan dengan negara. Partisipasi politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah memang tidak terlibat secara praktis, namun bukan berarti acuh atau tidak peduli terhadap politik negara. Pergerakan ini juga memiliki panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah. Perpolitikan organisasi ini dilakukan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah, serta tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

Permasalahan di atas telah menunjukkan bahwa pergerakan Islam perlu mengimbangi kepentingan negara sebagai kekuasaan formal, dan begitu pula sebaliknya. Artinya, ada sesuatu yang memang diperlukan untuk dapat

menghubungkan atau menjembatani antara kedua hal tersebut, sehingga kepentingan politik Islam dan negara dapat saling terakomodasi dan dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan nasional. Populisme Islam di Indonesia gagal membentuk *political frontier* dan identitas umat yang hegemonik. Faktor utama kegagalan ini karena ketidakmampuan membentuk sebuah aliansi antarkelas yang menjangkau jauh, dan populisme Islam di Tanah Air juga gagal menguasai negara dan *civil society* (Widyanto, 2017: 1).

Batas akhir dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara tidak dapat terwujud dengan identitas umat Islam yang hegemonik pula, kemudian hal ini menjadi pembelajaran bagi mayoritas masyarakat Muslim dalam proses berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Menghubungkan antara politik Islam dengan negara berkaitan dengan dinamika ideologi masing-masing kedua belah pihak tersebut. Keterbukaan dan tertutupan ideologi akan menentukan sejauhmana kedua prinsip tersebut dapat berkolaborasi dan bersinergi, atau mungkin sebaliknya, masing-masing prinsip saling berhadap-hadapan dan memperkuat argumentasi untuk kepentingannya sendiri.

Namun demikian, jika dalam perkembangan negara muncul tuntutan agar kedua pihak tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan visioner, maka dapat dikatakan perlu adanya depolarisasi ideologi sebagai bentuk sinkronisasi pemahaman antar kedua belah pihak yang terkait. Depolarisasi ideologi atau deideologisasi merupakan muara dari rasionalisme dan pragmatisme. Rasional membuat seseorang semakin mudah melepaskan diri dari postulat ideologis dalam melihat masalah, sehingga mudah berkompromi dengan pandangan berbeda. Sebaliknya, pragmatis membuat seseorang semakin mudah melampaui batasan-batasan ideologis dengan memberikan keuntungan (Hikam, 2014: 107). Dalam hal ini, maka diperlukan sisi rasional untuk menghubungkan politik Islam dengan negara dengan menyatukan kesamaan persepsi ideologi, yang juga diikuti dengan sisi pragmatis dengan memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat yang mayoritas Muslim tersebut.

Pergerakan Islam populis dalam menjembatani jurang ideologis antara Islam politik dan negara ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini, yang khususnya sangat penting adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Melainkan, keduanya harus dipandang sebagai saling melengkapi.

Pandangan khusus ini tumbuh dari pemahaman religio politik bahwa tiap sila dalam Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial) sejalan dengan ajaran Islam.

Karena itu, sama sekali tidak penting bagi para pendukung Islam politik, dan bukan pula kewajiban keagamaan mereka, untuk mempertanyakan legitimasi negara Indonesia yang secara formal didasarkan kepada sebuah ideologi yang *non* religius meskipun itu sama sekali tidak berarti tidak religius, apalagi anti agama (Effendy, 2011: 182). Secara sosiologis, berkaitan dengan proses menjembatani ini sebenarnya ada keharusan intrinsik bagi para politisi Muslim untuk memainkan peran penting dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan di Indonesia, semata-mata karena kaum Muslim adalah kelompok masyarakat terbesar di negara ini (Effendy, 2011: 184).

Selain menempatkan posisi politik Islam yang sejalan dengan politik negara yang berdasarkan Pancasila, para politisi Muslim juga perlu ikut serta dalam perpolitikan negara. Hal ini menjadi penting ketika politisi ini menjadi elit pejabat negara, karena kebijakan yang diperlukan dalam membangun negara tersebut juga perlu diikuti dengan mengakomodasi kepentingan politik Islam secara populis.

Kaum Muslim juga perlu membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap berbagai persoalan negara. Kedekatan politis dan ideologis yang kuat ini diharapkan bahwa ruang untuk berlangsungnya konfrontasi-konfrontasi yang tidak perlu secara politis maupun ideologis perlahan-lahan semakin menyempit (Effendy, 2011: 185).

Sinergi yang terbentuk dari kedekatan politis dan ideologis ini membuat ruang gerak masyarakat Muslim dan negara tanpa sekat, sehingga kedua belah pihak dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di bangsa, dan dapat saling bekerjasama dalam membangun negara untuk terus berkembang dan berkemajuan. Masyarakat Muslim dapat berafiliasi dalam berbangsa dan bernegara dengan berkontribusi membentuk organisasi Islam, partai politik Islam ataupun asosiasi sesuai kebutuhan masyarakat Muslim lainnya yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan nasional.

Partai Islam harus mau bergerak pada perjuangan isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Partai Islam harus mengambil isu-isu populis yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak seperti soal kemandirian pangan, subsidi pertanian, pendidikan murah, dan lain sebagainya (Fanani, 2013: 88).

Organisasi masyarakat Muslim, seperti Muhammadiyah, di abad baru harus siap untuk berjibaku dan menginspirasi aksi-aksi populis dan strategis, dengan memanfaatkan komitmen ideologis dan jaringan sosial dan politik yang dimilikinya, dalam penguatan wacana untuk melakukan pemerataan dan mengurangi berbagai kesenjangan dalam masyarakat (Latief, 2010: 84). Asosiasi dan pergerakan masyarakat Muslim lainnya pun juga perlu



membangun komitmen dalam pencapaian tujuan negara tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat sebagai aspirasi yang bersifat populis.

## **Moderasi Islam dalam perkembangan radikalisme**

Pasca era Reformasi yang telah membuka keran kebebasan bagi munculnya berbagai ideologi dan pergerakan, beberapa kelompok radikal dengan mengatasnamakan demokrasi, telah memanfaatkan angin kebebasan ini untuk menunjukkan eksistensi dirinya di Indonesia (Darraz, 2013: 155).

Paham dan gerakan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam banyak bermunculan pasca runtuhnya Orde Baru melalui sistem pendidikan di Indonesia, sebagian masyarakat muslim dalam negara demokrasi tersebut merasa berhak untuk menjalankan syariatnya dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penyelenggaraannya bertentangan dengan ideologi negara. Paham ini pun semakin menyebar lebih luas dan kompleks hingga masuk di perguruan tinggi, dengan menasar para mahasiswa sebagai generasi muda yang sedang mencari jati diri.

Radikalisme menurut Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa UMY (Johari, 2018) mengerucut pada paham yang dilekatkan pada golongan keagamaan yang memiliki paham terlalu keras dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini biasanya tumbuh dari latar belakang karena merasa terpojok karena tekanan rezim dari faktor ekonomi ataupun politik kemudian memunculkan konflik. Dalam hal yang sama, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNISA (Rifandi, 2018) memandang bahwa radikalisasi tersebut merupakan porses bagi mereka untuk menanamkan nilai yang mereka pahami untuk orang lain dalam konteks pemaksaan, dengan pendekatan-pendekatan agitasi dan provokasi yang menjadi proses mereka. Dalam konteks ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, radikalisasi menjadi ancaman karena konsensus negara Indonesia sendiri berdasarkan pada Pancasila dan tidak berdasarkan pada basis salah satu agama. Sementara itu, deradikalisasi itu fokus pada bagaimana orang itu tidak lagi percaya pada identitas dan nilai yang ada pada dirinya sehingga ikut kepada identitas yang lain. Pandangan tentang radikalisasi dari PTMA yang lain, Kepala Bidang Kemahasiswaan UAD (Setyono, 2018) berpendapat bahwa jika paham radikal yang selama ini tidak menerima paham yang lain, namun tidak mengganggu paham yang lain, tidak mengganggu persatuan, kebersamaan, dan keberagaman maka tidak menjadi masalah. Kata-kata radikalisme yang saat ini muncul adalah untuk menyerang Islam, yang seolah ada perbedaan pandangan Islam. Sementara itu, deradikalisasi digunakan untuk kepentingan pemetaan orang dalam melaksanakan syariatnya. Jadi, isu deradikalisme ini muncul karena adanya konflik kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Umat Islam Indonesia umumnya bersikap positif terhadap modernitas, namun kelompok garis keras justru bersikap reaksioner. Kelompok garis keras menganut paham absolutisme dan tidak berkompromi, intoleran terhadap berbagai sudut pandang, bahkan keragaman dianggap sebagai kontaminasi kebenaran yang diyakini (Wahid, 2009: 166). Radikalisme di negara ini tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Sistem pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk memberikan penawar terhadap kontaminasi tersebut, sehingga nilai-nilai Islam dapat berjalan tanpa harus berlawanan dengan negara.

Proses radikalisasi yang menysasar pada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa semakin mengancam eksistensi ideologi Pancasila, dan hal ini perlu segera ditanggulangi secara bijaksana melalui satuan pendidikan. Perguruan tinggi berbasis Islam memiliki pengaruh penting dalam penanggulangan bahaya radikalisme tersebut. Hal ini karena sifat radikal sebagaimana dijelaskan di atas lebih cenderung pada nilai-nilai Islam yang fanatik, oleh karena itu peran perguruan tinggi ini perlu mempertegas bahwa paham Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan paham Islam.

## **Peran Perguruan Tinggi terhadap Radikalisme**

Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mayoritas di antara agama-agama yang lain. Peran dari perguruan tinggi ini pun besar dalam memberikan sumbangan pemikiran intelektual akademis dalam proses pembangunan negara, tidak terkecuali dalam pembangunan nilai-nilai Islam yang bersifat politik, seperti kebijakan-kebijakan negara yang bersifat Islami. Sementara itu, bagi para masyarakat yang berpaham radikal dan ekstrim dalam pemikiran agama Islam sebagai dasar fundamental dalam kehidupan konstitusional negara.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) sebagai basis terbesar dalam organisasi masyarakat Islam juga memegang peranan penting dalam menjaga dinamika ketahanan nasional dari radikalisme. Perguruan tinggi ini berdasarkan pada nilai-nilai *Al-Islam* dan Kemuhammadiyahan, sehingga arah orientasi lulusan mahasiswanya mengarah pada basis paham berdasarkan nilai-nilai tersebut. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai pihak pengelola dari satuan pendidikan tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara yang baik, adil dan sejahtera. Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat Muslim di tanah air menyongsong kehidupan modern/urban. Muhammadiyah merupakan kekuatan progresif tapi

tidak radikal dalam tindakan, walaupun pemikiran-pemikirannya mungkin dianggap revolusioner untuk ukuran saat itu.

Muhammadiyah menjalankan misi perubahan bukan melalui revolusi fisik atau mengandalkan kekerasan, melainkan melalui gerakan dakwah dan pendidikan (Bayuni, 2010: 60). Sikap Muhammadiyah ini juga tercermin dalam Amal Usaha Muhammadiyah melalui PTMA sebagai satuan pendidikan yang membangun kehidupan modern dan berkemajuan, yang turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Buku ini mencoba menggambarkan data informan dari kedudukan lembaga (biro/divisi/bidang) kemahasiswaan PTMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini tentu memiliki peran penting dalam mengendalikan pengaruh paham-paham yang berbahaya bagi organisasi kemahasiswaan. Rifandi (2018) Biro kemahasiswaan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta dalam wawancara penelitian ini mengungkapkan bahwa posisinya sangat jelas, karena bersangkutan legitimasi di perguruan tinggi, sehingga jika terdapat permasalahan akan langsung dipotong pada jalur tersebut. Peraturan dari pemerintah juga melarang adanya paham radikal tumbuh di perguruan tinggi.

Lembaga kemahasiswaan memberikan pemahaman kebangsaan pada saat Mataf (Masa Ta'aruf) sebagai poin materi yang harus disampaikan, termasuk perilaku menyimpang lainnya seperti bahaya narkoba, dengan mendatangkan pematerinya langsung dari Kapolda DIY. Namun demikian, lembaga kemahasiswaan sejauh ini menilai belum ada formula pasti yang bisa menjaga saat mahasiswa masuk sampai dengan selesai kuliah, agar tidak terkontaminasi dalam dunia radikal.

Legalitas keberadaan suatu organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi ini tentu sangat penting di tengah berkembangnya pergerakan-pergerakan yang bersifat militan dan berbasis pada gerakan akar rumput. Sifat dari organisasi tersebut tidak banyak diketahui oleh publik, namun keberadaannya dapat dikatakan membahayakan nilai-nilai yang telah dibangun di perguruan tinggi yang telah bersinergi dengan nilai-nilai kenegaraan.

Dengan demikian, peran Lembaga kemahasiswaan dalam melagalkan organisasi-organisasi kemahasiswaan menjadi penting untuk mengoreksi paham dan gerakan yang berada dalam perguruan tingginya. Bahkan keberadaan organisasi yang bersifat akar rumput dan tidak legal yang berdasarkan nilai-nilai yang tidak sevisi dengan perguruan tinggi dapat dibubarkan secara tegas.

Lembaga kemahasiswaan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi bersama dan melihat fakta yang

ada dengan berbagai pemikiran, dengan adanya ruang ini mahasiswa akan dapat memahami hal yang terjadi. Setyono (2018) Biro kemahasiswaan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam wawancara penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi IMM memiliki kajian keagamaan rutin yang berperan aktif, baik untuk UAD sendiri ataupun kepada masyarakat. Kebijakan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa yang baru masuk UAD adalah kegiatan PPK (Program Pengenalan Kampus) dan Masta (Masa Ta'aruf) sebagai pembekalan tentang keorganisasian di kampus maupun persiapan di dunia kerja.

Waktu masuk pada awal perkuliahan di perguruan tinggi menjadi momen penting untuk membangun konstruksi berfikir mahasiswa secara fundamental, karena pada masa awal tersebut mahasiswa masih berfikir general dan masih rawan terhadap penyusupan nilai-nilai ekstrim yang belum dipahami secara mendasar oleh mahasiswa baru.

Program masa orientasi di awal perkuliahan dilibatkan dengan nilai-nilai yang bermuatan materi ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, sehingga di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah yang berbasis nilai Islam tetap sejalan dengan pemikiran kenegaraan. Dengan demikian, jika dalam perkuliahan berikutnya mahasiswa mendapatkan paham-paham yang radikal dari suatu pergarakan atau organisasi kemahasiswaan dapat ditangkal dengan pemikiran yang logis yang telah ditanamkan pada saat masa orientasi perkuliahan.

Tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi di atas sesuai dengan prinsip Muhammadiyah dalam mengimbangi nilai kenegaraan dan keagamaan, sehingga tidak bersifat radikal. Hal ini dapat dilihat pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/PED/I.0/B2012 yang menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai *Al-Islam* dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif, serta menjadi salah satu kekuatan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

Peran Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dalam hal ini jika menemukan mahasiswa yang radikal bahkan mengarah pada tindakan kriminal, maka hal yang pertama yang akan dilakukan adalah dapat melakukan pembinaan ataupun jika perlu akan mengundang orang tua/walinya. Namun jika memang mahasiswa tersebut tetap pada pendirian dalam radikalismenya, maka pihak perguruan tinggi dapat mengeluarkannya, dan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah sebagai usaha dalam bidang pendidikan yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai *Al-Islam* dan Kemuhammadiyah pada

tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif berupaya membangun karakter generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Namun, mahasiswa pada muda ini perlu diberikan pembinaan karakter sesuai dengan visi perguruan tinggi dalam membangun karakter keislaman dan kenegaraan.

Mubarak (2013: 196) menjelaskan bahwa usia muda yang merupakan fase pencarian jati diri ditandai dengan rasa penasaran serta hasrat tinggi mencoba berbagai pengalaman religiusitas menjadi ruang masuknya berbagai faham keagamaan. Arus keagamaan radikal memiliki pengaruh signifikan dengan kegiatan keagamaan yang menyuarakan aspirasi fundamentalisme Islam, seperti pembentukan Negara Islam atau Khilafah Islamiah.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam memahami karakter kenegaraan yang telah merdeka dari penjajah dengan struktur pemikiran negarawan yang nasionalis dan multikultural. Konsep kenegaraan yang telah menjadi konstitusi negara tidak dapat dengan konstruksi dengan konsep Negara Khilafah atau negara berdasarkan syariat agama Islam.

Posisi mahasiswa dalam hal ini sangat menentukan arah pergerakan negara di masa mendatang, sehingga sikap kritis dan empati mahasiswa menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh institusi perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran yang sangat menentukan arah paham dan pemikiran mahasiswa ke depan.

## **Gerakan Mahasiswa dalam Menyikapi Radikalisme**

Informan yang diambil dalam buku ini adalah pergerakan mahasiswa dari organisasi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Swasta, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan kemahasiswaan dalam PTMA atau yang disebut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki posisi penting dalam membangun karakter pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Gerakan pemuda dari PTMA ini berperan dalam menanggulangi radikalisme dengan membangun nilai-nilai keislaman yang diimbangi dengan nilai-nilai kenegaraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mustaqim (2010: 6) mengungkapkan bahwa gerakan pemuda yang perlu dibentuk adalah lebih mengedepankan pada pembentukan karakter, laboratorium kepemimpinan, dan membentuk kepehaman terhadap permasalahan lokal serta global, dan kontribusi dalam tataran ide maupun aksi.

Pemuda itu sendiri menurut Matara (2013: 10) adalah orang yang melakukan perjuangan untuk membangun pribadi yang mandiri menjadi terlibat secara sosial, yaitu bahwa seorang pemuda seharusnya terlibat dalam pergaulan sosial, berupa kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Media pergerakan mahasiswa yang terdapat pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terkonstruksi dengan pemikiran-pemikiran keagamaan dan kenegaran.

Konsep ke-Islaman dan ke-Indonesiaan menjadi hal penting untuk disejajarkan dalam paham dan pergerakan kemahasiswaan, sehingga dalam satu sisi tidak menjadi pergerakan yang bersifat ke kanan (ekstrim religius) dan tidak pula menjadi pergerakan yang ke kiri (ekstrim komunis). Radikalisme menjadi makna ekstrim untuk mendefinisikan dua klasifikasi pemikiran tersebut, namun dalam realisasinya banyak penafsiran yang masih awam untuk mendeskripsikan paham tersebut.

Dengan demikian, dalam realisasinya itu pula banyak suatu pergerakan atau organisasi kemahasiswaan yang tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan banyak hal tanpa memahami secara mendasar dari makna filosofis pergerakan yang telah diperjuangkannya. Pandangan IMM terhadap radikalisme dalam ormawa menurut Koordinator Komisariat IMM UMY (Fikri, 2018) lebih mengarah agar mahasiswa bergerak secara intelektual, religiusitas, dan humanitas.

Pergerakan pada bidang tersebut dilakukan agar tidak termasuk golongan-golongan orang ataupun organisasi mahasiswa yang secara radikal. Religiusitas menurutnya adalah sebagai bentuk ibadah, yang merupakan hubungan *habluminallah*, *habluminannasi*, dan *habluminalam*. Hal tersebut menjadi kajian yang diskusikan dengan anggota-anggota IMM untuk membentuk suatu manusia yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

Pergerakan kemahasiswaan melalui IMM dalam menghadapi radikalisme dituntut untuk berfikir ke arah pemikiran yang kritis, yang mengarahkan mahasiswa pada hal yang bersifat intelektual, religiusitas, dan humanitas. Hal ini perlu dipahami bahwa paham radikal mengaitkan dua kutub yang berbeda, yaitu antara pemikiran berdasarkan nilai-nilai dalam agama Islam dengan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, sehingga paham fundamental satu agama sangat berpotensi menimbulkan perpecahan besar jika dijadikan paham dasar negara yang bersifat plural.

Prinsip pemeliharaan pikiran dengan tidak membenturkan paham keagamaan dengan kenegaraan inilah yang sampai saat ini terus diujikan, baik melalui muatan materi pendidikan hingga dalam bentuk gerilya dengan aksis terror dan sebagainya. Sementara itu, Koordinator Komisariat IMM UAD (Sohib, 2018) mengungkapkan bahwa seorang kader dalam ormawa perlu

membawa kepentingan IMM, yaitu menjaga amal usaha Muhammadiyah supaya tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak mengenal Muhammadiyah dan tidak mengakui Muhammadiyah.

Radikal sama artinya dengan fundamental, yaitu mengakar dari bawah, benar-benar dihayati ditiru totalitas dan kerja keras tidak setengah-setengah. Sisi positif yang dapat diambil dalam hal ini adalah ketika seorang mahasiswa mengaku sebagai kader IMM, maka segala aturan yang ada di IMM akan diakui dan dipatuhi.

Peran yang sudah dilakukan IMM menurut Koordinator Komisariat di UNISA (Rifqi, 2018) di antaranya adalah pelaksanaan kajian-kajian ke-Islaman dan kebangsaan. Organisasi IMM juga mencoba menyebarkan keseluruhan penjuror organisasi yang ada di perguruan tinggi, agar tetap menjaga ideologi Muhammadiyah. Salah satunya dengan diaspora kader, diaspora mahasiswa-mahasiswa yang ada di IMM dikirim ke organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) secara berkelanjutan. Pemikiran mahasiswa dalam IMM perlu memperhatikan secara mendasar melalui pemahaman ideologi Muhammadiyah secara menyeluruh.

Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk loyalitas generasi muda terhadap organisasi Islam yang besar dan telah berkontribusi besar juga dalam membangun peradaban negara hingga saat ini. Pergerakan mahasiswa yang akan melanjutkan pemikiran negarawan di masa depan sangat penting untuk memahami diskursus pemahaman antara persepsi religius dengan nasionalis. Dengan demikian, konsepsi radikalisme akan terpecahkan dengan sendirinya ketika pemikiran kritis mahasiswa ini mampu mengintegrasikan pemikiran keagamaan untuk membangun peradaban negara yang sejahtera.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan deradikalisasi menurut Setyono (2018) adalah membuat definisi yang sama terkait dengan radikalisasi dan perlu memperjelas penggunaan dari istilah radikalisasi. Berkaitan dengan hal ini, Rifandi (2018) juga menjelaskan jangan terlalu sederhana menilai radikalisasi, karena harus dipahami bahwa indikator radikal bukan pada orang.

Mahasiswa dalam hal ini selalu menjadi alat, karena mereka memiliki mimpi untuk memperbaiki tatanan ekonomi politik Indonesia ke depan. Sementara itu, pendekatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi radikalisme itu menurut Johari (2018) dilakukan dengan pendekatan budaya, yaitu mengembalikan fungsi Islam pada aslinya. Menurutnya, Islam datang bukan untuk meresahkan masyarakat, akan tetapi untuk mengajak *rahmatan lill'alam*, jadi sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pada maksud deradikalisasi di atas, pada hakikatnya perlu dipahami terlebih dahulu dengan makna kata deradikalisasi tersebut. Secara tata bahasa, maka dapat dimaknai sebagai proses yang menegaskan dari segala sesuatu yang bersifat ekstrim dan fundamental. Pada saat bersamaan, perlu juga dipahami perbedaan antara nilai Islam dengan nilai Pancasila, yaitu antara agama sebagai syariat dengan ideologi sebagai sosial budaya.

Dengan demikian, arah pemikiran deradikalisasi ini semakin jelas tujuannya, yaitu menegaskan pemikiran atau paham yang tertutup, bukan menyalahkan syariat dalam nilai agama itu sendiri, dan bukan pula memaksakan syariat agama sebagai modal alasan untuk menggantikan ideologi atau pemikiran manusia sebagai tatanan sosial budaya dalam kehidupan bernegara. Hal terpenting dalam deradikalisasi menurut Rifandi (2018) adalah tentang cara mahasiswa paham dengan nilai kemuhammadiyah. Radikalisasi ini terjadi pada saat berhubungan dengan politik yang selalu muncul, sedangkan persoalan yang perlu ditanamkan adalah lebih pada konteks pemahaman dan pemikiran Islam, fiqih, aqidah, dan akhlak. Gerakan radikal ini dinilai masih relatif aman dalam PTMA, karena kesibukan kuliah para mahasiswa yang tidak sempat memikirkan ke arah radikal.

Setyono (2018) juga menekankan untuk lebih mengutamakan pengembangan *soft skill* dari pada pendidikan tentang deradikalisasi. Pendidikan tentang *soft skill* akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ke depan, sehingga kesibukan ini akan mengalihkan perhatian mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya dari pada sibuk mempermasalahkan perbedaan paham radikal.

Pada sisi lain, Johari (2018) menuturkan bahwa munculnya radikalisme hingga pemberontakan itu disebabkan karena tidak adanya kesejahteraan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Radikalisasi menjadi bahan instropeksi bagi pemerintah untuk mencari penyebab paham tersebut muncul, yaitu lebih kepada pembangunan dan keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Konsep penafsiran sederhana terkait deradikalisasi dapat diartikulasikan dengan pembangunan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemikiran fundamental dan ekstrim yang kontroversial dengan paham pemikiran yang lain dalam kasus radikalisme ini muncul ke permukaan dikarenakan tuntutan terhadap ketidakadilan dan ketidaksesjahteraan yang dialami seorang maupun sekelompok orang. Sikap kritis dalam pemikiran dan pergerakan yang perlu ditanamkan dalam organisasi kemahasiswaan yang revolusioner dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, hingga pertahanan keamanan negara menjadi lebih menarik dari pada bersikap radikal.



Mahasiswa dalam hal ini dituntut untuk produktif melalui pemikiran dan pergerakan yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dirinya, sehingga dapat menjadi inspirasi dalam berkontribusi pembangunan negara yang lebih sejahtera.

## **Analisis Strategi Deradikalisme Organisasi Kemahasiswaan**

Radikalisme dan ekstrimisme sebagaimana didefinisikan di atas menjadi bahan pertimbangan mendasar bahwa perlunya strategi dalam rangka pembangunan kebijakan deradikalisasi. Upaya ini memerlukan analisis mendalam terkait posisi PTMA maupun IMM dalam menghadapi radikalisme, mulai dari analisa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), ancaman (*threats*), dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki. Analisis keempat hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh PTMA maupun IMM dengan tahapan-tahapan yang jelas dan strategis.

Berdasarkan analisis kekuatan di UNISA menurut Rifandi (2018) adalah legitimasi. Hal ini karena ketika gerakan radikal masuk ke perguruan tinggi, pihaknya dapat dengan segera membubarkannya, sehingga jika ada organisasi baru yang terlarang dapat dicegah oleh universitas. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah memiliki wadah IMM sebagai media organisasi kemahasiswaan, dan sejauh ini tidak memiliki susunan radikalisme. Jika ada paham radikal yang masuk, pihaknya bisa memastikan hal tersebut akan segera dipotong ataupun dicegah.

Menurut Setyono (2018) di UAD juga memiliki kekuatan yang sama, yaitu melakukan kontrol lembaga, karena dalam setiap kegiatan IMM selalu ada pengecekan dan persetujuan dari biro kemahasiswaan yang harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Rifandi (2018) menilai kendala dalam menghadapi paham radikal ini adalah karena organisasinya yang berjejaring, serta membawa organisasi sendiri dengan membuat kelompok seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), sedangkan dalam PTMA seharusnya lembaga tersebut berada di bawah IMM.

Sementara itu ada dua hal yang menjadi kelemahan dari gerakan radikal ini menurut Rifandi (2018), yaitu mereka membentuk kelompok dan bermain di akar rumput sehingga pihak perguruan tinggi tidak tahu, serta ada kemungkinan mereka melakukan penyusupan sehingga pihak perguruan tinggi tidak mungkin untuk melakukan pendekatan satu per satu.

Johari (2018) juga menyatakan hal yang sama, bahwa pihaknya tidak bisa memantau satu per satu selama 24 jam. Namun UMY memfasilitasi mahasiswa untuk meminimalisir paham radikal tersebut, yaitu membentuk kanalisasi untuk mengalihkan energi-energi mahasiswa dalam 35 UKM,

organisasi mahasiswa HMJ, BEM fakultas dan universitas yang jumlahnya lebih dari 90 organisasi internal kampus.

Pada sisi lain, beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PTMA menurut Rifandi (2018), yang pertama ada adalah dengan menguatkan organisasi yang sudah ada dan mengembangkannya. Kedua, melakukan kerja tim baik mahasiswa yang belum ataupun yang sudah lulus. Ketiga, PTMA memiliki Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) yang dapat menguatkan nilai secara ke-Islam-an, dan memiliki Lembaga Admisi universitas yang dapat mensortir data informasi sejak awal masuk.

Sementara itu dari Kemenristekdikti juga telah memberikan surat edaran yang menjadi peluang besar untuk menanggulangi radikalisme pada organisasi mahasiswa. Setyono (2018) juga mengatakan peluangnya adalah dengan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa, dan secara eksternal PTMA juga bekerjasama dengan pihak kepolisian provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga keamanan dari bahaya radikalisme.

Berkaitan dengan ancaman, Rifandi (2018) menuturkan yang menjadi tantangan adalah media sosial yang digunakan oleh gerakan radikal untuk menarik mahasiswa lain ke arah yang ekstrim. Ancaman yang sama juga ditanggapi Johari (2018), yaitu ketika muncul isu *hoax* melalui sosial media, dan mahasiswa tidak bisa menyaring bahaya radikal. Namun demikian, menurut Setyono (2018) menyatakan bahwa yang sebenarnya menjadi ancaman dan kendala yang sebenarnya bagi mahasiswa adalah sifat hedonisme, bukan radikalisme.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di atas, maka strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan data-data saat penerimaan mahasiswa baru untuk diproses dan dilihat pada saat Orientasi Studi Dasar Islam di PTMA.

Studi ini mengenalkan Islam yang damai dan berkemajuan. Data-data kemahasiswaan tersebut juga digunakan untuk diidentifikasi, kemudian melakukan pendekatan persuasif agar mahasiswa yang memiliki paham radikal dapat berubah, dan pendekatan represif dengan menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Strategi yang lain adalah dengan mengalihkan perhatian mahasiswa kepada hal-hal yang positif, seperti mengembangkan minat, bakat dan potensinya pada unit-unit kemahasiswaan ada di perguruan tinggi.

Mahasiswa dan pihak PTMA juga dapat memfokuskan diri untuk meraih prestasi-prestasi, dengan mengikuti kompetisi dalam bidang akademik maupun kreatifitas yang akan bermanfaat untuk perguruan tinggi maupun mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian, pengaruh paham radikal tidak akan berdampak apapun pada mahasiswa, karena dirinya menyadari bahwa

partisipasinya dalam unit-unit kemahasiswaan dan prestasi yang diraihinya jauh lebih bermanfaat bagi mahasiswa.

## **Ormas Islam dalam membangun persepsi Negara Pancasila**

Organisasi masyarakat Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama memiliki pandangan religius dalam menafsirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama dapat dikatakan memiliki pemikiran intelektual dan religius dalam memahami ideologi sebagai hasil produk dari manusia, sedangkan memahami agama sebagai hasil ajaran dari Tuhan. Pada buku ini mengambil informan dari Muhammadiyah yang memiliki struktur kelembagaan kuat dan komprehensif sebagai model pendekatan persepsi Negara Pancasila dari sudut pandang pemikiran Islam.

Nashir (2007: 20-21) berpendapat bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam memiliki pemahaman intelektual muslim yang mengarah pada pembaruan, yang bersifat reformis dan modernis, sehingga persyarikatan ini mendukung penuh Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Muhammadiyah memerlukan kristalisasi dalam substansinya, yakni memahami kandungan isi ideologi tersebut, setelah itu dilakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan dan menanamkannya dalam kesadaran dan alam pikiran seluruh anggota, dan lebih jauh lagi menjadikan sebagai landasan idealisme, pemikiran, dan langkah dalam seluruh gerak Muhammadiyah secara kelembagaan.

Muhammadiyah memandang Indonesia dalam arti Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Konsep negara ini secara nasional telah dideklarasikan pada saat Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar. Nashir (2014: 65) menegaskan bahwa Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional (*dar al-ahdi*) dan lahan berdakwah serta bertajdid (*dar al-syahadah*) sejalan misi utama Muhammadiyah. Hal yang paling penting ialah agar negara Indonesia terus diusahakan selalu dijiwai, dibingkai, dipengaruhi, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur agama sehingga menjadi *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Perumusan dan penerimaan ideologi Pancasila sebagai bagian dasar Negara Indonesia telah berlangsung sejak proses konsensus pada sidang Badan Penyelidik Umum Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan proses persaksian dan partisipasi Muhammadiyah juga sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka pada saat berdirinya organisasi tersebut tahun 1912. Namun demikian, deklarasi konsep Negara

Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* pada tahun 2015 perlu disosialisasikan untuk mempertegas kembali, sebagai bentuk eksistensi dan keberlangsungan negara Indonesia dengan latar belakang yang beranekaragam suku, budaya, dan agama.

Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan cara menggali, mengintegrasikan, mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai luhur keindonesiaan dalam kerangka Islam yang berkemajuan. Islam yang kemajuan yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi. Konteks terkait dengan hal di atas akan dibahas dalam Pengajian Ramadhan 1437 PP Muhammadiyah, yang akan mengelaborasi lebih dalam dan lebih luas pemikiran tentang Negara Pancasila sebagai *darul 'ahdi wa syahadah* dalam perspektif teologis dan ideologis.

Pemikiran tentang Negara Pancasila dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah. Sosialisasi ini juga tidak berhenti pada saat Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 tersebut, melainkan perlu ditindaklanjuti hingga tingkat daerah dengan ukuran dan indikator-indikator yang jelas.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum menyadari bahwa ajaran-ajaran dalam agama Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Strategi sosialisasi Muhammadiyah dalam membangun persepsi Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* dapat dilaksanakan paling tidak melalui beberapa media. Isngadi selaku Direktur Eksekutif Suara Muhammadiyah dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa Islam dan Negara maupun Islam dan Undang-undang sudah selesai sejak zaman dahulu. Saat deklarasi Indonesia merdeka mulai menerima UUD 1945 itu sudah selesai bagi Muhammadiyah, yaitu saat Ki Bagus sudah menerima pembukaan UU yang sudah seperti yang menggantikan Piagam Jakarta. Isngadi berpendapat bahwa.

Suara Muhammdiyah mewartakan kegembiraan Muhamamdiyah, untuk motivasi warga Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah memiliki dua strategi sosialisasi umum yang dapat dikaitkan dengan kepentingan sosialisasi materi Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*, yaitu Suara Muhammadiyah yang cetak sejak 1915 dan yang *online* sejak sekitar 2015. Suara Muhammdiyah *online* berisi relatif bebas, dan lebih banyak berita yang diterbitkan dimedia cetak.

Visi Suara Muhammadiyah berupa peneguhan dan pencerahan serta penghiburan. Peneguhan maksudnya adalah teguh dalam ke-Islam-an dan ke-Muhammadiyah-an, sedangkan pencerahan adalah keteguhan yang tercerahkan. Peneguhan sifatnya hanya pada diri sendiri, sedangkan jika hanya pencerahan sifatnya terjebak pada pemikiran bebas. Termasuk dalam *Darul Ahdi Wasyahadah* yang juga memakai peneguhan dan pencerahan.

Pada sisi lain, Direktur Eksekutif Radio Muhammadiyah (RadioMu), Abey Arsyad Mukti, mengungkapkan bahwa embrio radio tersebut sudah ada sejak 2008 dengan masih menggunakan radio pemancar sebagai radio komunitas pada frekuensi 107,9. RadioMu ini berada di bawah Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian terus berkembang pada tahun 2012 resmi masuk di radio *Streaming*.

Radio Muhammadiyah selalu melakukan peliputan setiap program kerja Muhammadiyah, seperti Mukatamar dan program kerja rutin lainnya. Setiap majelis juga memiliki rencana kerja nasional, dan menyelenggarakan seminar yang disiarkan secara *on air*. Liputan khusus lainnya seperti momentum Mukatamar di Makassar tahun 2015 yang mensosialisasikan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Pihak Radio Muhammadiyah menyatakan bahwa program khusus tentang *Darul Ahdi Wasyahadah* memang belum ada, tetapi lembaga tersebut mempunyai program Bincang-Bincang Sore. Program tersebut menghadirkan berbagai nara sumber yang berkompeten dalam berbagai aspek kehidupan. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari *Darul Ahdi Wasyahadah*, karena sudah merupakan wujud operasional dari ideologi Pancasila, yaitu dalam upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Televisi Muhammadiyah memiliki misi untuk melakukan kontrol sosial yang kritis, santun, bertanggungjawab dan berwawasan luas melalui televisi berkarakter pendidikan dan dakwah yang berbasis Islam yang berkemajuan. Televisi ini menjadi media komunikasi antar warga anak bangsa dalam merajut kebhinekaan dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Media ini juga menjadi medium yang edukatif, ilmiah, rasional dan relegius serta membentuk kepribadian bangsa, melalui program pendidikan dengan kemasan yang menarik dan mudah dicerna. Berdasarkan pada misi tersebut, Televisi Muhammadiyah jelas sejalan dengan agenda sosialisasi nilai-nilai kenegaraan dan keagamaan, yang berkaitan dengan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Televisi yang sudah berdiri sejak 2013 ini juga memiliki program-program yang berupaya mengusung konsep kenegaraan dan keagamaan yang sejalan.

Program-program dalam televisi ini di antaranya adalah Program Islam berkemajuan, yang mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang modernis dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Acara yang pernah

ditayangkan dalam program ini di antaranya adalah *talk show* yang berjudul Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan di Tanah Air, Hukum Pidana dalam Islam, Membangun Persatuan Umat, Kerukunan antar Umat Beragama, dan lain sebagainya. Program lain yang ada dalam Televisi Muhammadiyah yang ikut serta dalam mensosialisasikan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* adalah Program Indonesia Berkemajuan. Acara yang pernah ditayangkan dalam program ini adalah *talk show* yang berjudul Faktor Watak yang Menunjang Kemajuan Bangsa, dan Faktor Agama Untuk Kemajuan Bangsa. Program Pengajian Bulanan juga menjadi agenda kegiatan dalam Televisi Muhammadiyah, dan juga sejalan dengan agenda sosialisasi konsep Negara Pancasila, walaupun memang tidak memiliki strategi dan rencana yang khusus untuk mensosialisasikan konsep tersebut. Pada program ini pernah menayangkan kajian yang berjudul Islam, TNI dan Kedaulatan Bangsa pada 6 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementara itu, sosialisai terkait Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* dinilai penting bagi Arsyad selaku pimpinan dalam Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan mengungkapkan belum pernah secara khusus menerima limpahan kewenangan untuk menyampaikan konsep *Darul Ahdi Wasyahadah* hasil dari Mukhtar. Pihaknya menyampaikan bahwa yang biasa dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah) yang berceramah untuk menjelaskan ke PTMA tentang *Darul Ahdi Wasyahadah* itu. Pihaknya juga menyatakan tidak ada rencana strategi secara khusus untuk mensosialisasikan konsep Negara Pancasila tersebut.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan berpendapat bahwa materi seperti Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) merupakan suatu bentuk rekomendasi, dan mungkin *Darul Ahdi wa Syahadah* dimasukkan dalam kurikulum AIK tersebut. Pada sisi lain, Majelis ini juga menyatakan sedang dalam proses menerbitkan buku, namun memang tidak secara spesifik untuk mensosialisasi *Darul Ahdi wa Syahadah*. Bahkan Majelis ini akan membuat buku AIK yang khusus untuk orang Indonesia Timur yang non Islam, karena sasarannya adalah untuk semua, yaitu agar orang non Muslim juga tahu arah pergerakan Muhammadiyah.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai materi ini penting untuk disosialisasikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, dan berharap materi ini juga dapat ditindak lanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi terkait untuk memasukkannya dalam kurikulum pembelajaran. Perguruan Tinggi

Muhammadiyah Aisyiyah sebagai basis terbesar dalam organisasi masyarakat Islam memegang peranan penting dalam menjaga dinamika ketahanan nasional dari radikalisme. Perguruan tinggi ini berdasarkan pada nilai-nilai *Al-Islam* dan Kemuhammadiyah, sehingga arah orientasi lulusan mahasiswanya mengarah pada basis paham berdasarkan nilai-nilai tersebut. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai pihak pengelola dari satuan pendidikan tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara yang baik, adil dan sejahtera.

Perguruan tinggi yang merepresentatifkan dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi tiga universitas yang akan dijelaskan lebih lengkap di bawah. Pada prinsipnya argumentasi yang disampaikan pada saat wawancara di tiga universitas tersebut dapat dikatakan telah mewakili secara universal dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia, karena secara struktural masih berada di bawah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Rifandi (2018) selaku kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNISA mengungkapkan bahwa dalam konteks ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an, radikalisasi menjadi ancaman karena konsensus negara Indonesia sendiri berdasarkan pada Pancasila dan tidak berdasarkan pada basis salah satu agama. Dalam proses pembelajaran penting bagi mahasiswa untuk memahami nilai ke-Muhammadiyah-an. Dalam hal ini, persoalan yang ditanamkan adalah lebih pada konteks pemahaman dan pemikiran Islam, fiqih, aqidah, dan akhlak. Pemahaman penting bagi mahasiswa terkait nilai kenegaraan dan keagamaan agar dapat memaknainya dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perguruan tinggi menjadi media pembelajaran yang penting, yang tidak hanya mengajarkan pengaruh Islam dalam membangun negara, melainkan juga proses penerimaan masyarakat Muslim terhadap Pancasila.

Proses pembelajaran di UNISA juga meliputi materi *Darul Ahdi wa Syahadah*, yaitu terdapat dalam materi perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan pada mahasiswa saat awal perkuliahan. Materi tersebut disampaikan pada pertemuan kedua dengan topik Sejarah Pancasila dan *Darul Ahdi wa Syahadah*. Topik ini berisi tentang proses pembentukan negara Indonesia, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, hingga keterlibatan Muhammadiyah pada saat perjuangan sebelum kemerdekaan, perumusan Pancasila, kontribusinya dalam membangun bangsa hingga saat sekarang.

Kepala Bidang Kemahasiswaan UAD (Setyono, 2018) berpendapat bahwa Di UAD gerakan kemahasiswaan tidak ada masalah, di UAD juga tidak

ada Lembaga Dakwah Kampus kecuali di bawah IMM. Paham yang ditakutkan itu ketika ada kumpulan-kumpulan yang memang membawa ajaran-ajaran radikal. Sama halnya di UNISA, di UAD pun memiliki kebijakan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa baru yang masuk UAD mengikuti kegiatan Program Pendidikan Karakter (P2K) dan Masa Taaruf (MASTA) sebagai pembekalan tentang keorganisasian di kampus maupun persiapan di dunia kerja.

Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa UMY (dalam wawancara dengan Johari, 2018) mengungkapkan bahwa di negara ini kebebasan untuk mengungkapkan identitas agama itu bebas pasca reformasi, sehingga tumbuh subur di Indonesia. Radikalisme itu identik dengan pelekatan nama saja, tapi untuk mengidentifikasi siapa yang radikal itu susah. Pihak kemahasiswaan di UMY melakukan pembinaan terstruktur, yaitu melalui Divisi Pengembangan minat dan Bakat Mahasiswa di bawah Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyah.

Program-program yang ada di UMY sama dengan dengan program di perguruan tinggi lainnya, yaitu pada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) di bawah Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyah yang selaras dengan Islam yang berkembang, termasuk kajian-kajian di dalamnya. Lembaga kemahasiswaan maupun lembaga keagamaan dalam perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Hal ini karena secara praktis dapat langsung diterima dan dimanfaatkan secara langsung oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahaminya dengan mudah.

Di UMY juga pernah menjadi media penyelenggaraan pengajian yang mengangkat tema “Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*” pada tanggal 9 hingga 11 Juni 2016. Dalam laman muhammadiyah.or.id menjelaskan bahwa tujuan kajian tersebut adalah memperoleh pemahaman dan acuan yang komprehensif tentang transformasi nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pandangan Islam yang berkembang. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan wawasan warga Muhammadiyah sebagai komponen strategis bangsa dalam menghadapi tantangan yang kompleks di tengah dinamika umat, bangsa dan perkembangan global. Materi-materi yang disampaikan di antaranya adalah Nilai-nilai Pancasila dalam Pandangan Islam, Negara Pancasila sebagai Perwujudan *Darus Salam*, Transformasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara, Transformasi Nilai Kemanusiaan dan Persatuan dalam Kehidupan Bernegara, dan Transformasi Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam Bernegara.



## PENTUTUP

Pergerakan masyarakat yang beragama Islam sebagai agama populis muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap politik negara yang dinilai tidak dapat mengakomodasi kepentingan mayoritas masyarakat Muslim. Sementara itu, kemunculan gerakan ini juga sangat terkait dengan ketakutan atau trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara yang membuat tujuan nasional semakin jauh dari harapan bersama. Faktor sejarah terkait keterlibatan mayoritas masyarakat Muslim dalam mewujudkan kemerdekaan negara dan pembangunan negara, membuat politik Islam perlu terlibat dalam mengevaluasi sistem pemerintahan negara, bahkan bukan tidak mungkin untuk melakukan modifikasi sistem pemerintahan yang baru untuk mewujudkan tujuan negara.

### Kesimpulan

Perkembangan paham radikal dalam negara kontemporer saat ini menjadi perhatian terkait eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi pemikiran ini tidak lagi cukup dalam hal teori, akan tetapi dalam implementasi teknis politik Islam di tengah kepentingan nasional. Representatif bentuk pergerakan Islam populis yang memiliki implikasi terhadap politik negara dapat terlihat dari aktivitas sosial dan politik masyarakat Muslim secara individu maupun kelompok yang terorganisir. Pergerakan politik Islam yang berkembang dari masyarakat dapat diklasifikasikan dengan gaya Islam populis yang fanatik dan mengarah pergerakan fundamental, serta gaya Islam populis yang modernis dan reformis tanpa meninggalkan nilai Islam itu sendiri.

Organisasi masyarakat Islam semakin berkembang dengan pemikiran politiknya masing-masing, hingga berevolusi menjadi organisasi politik yang setara dengan negara. Hal ini sudah terjadi sejak lama, karena pengaruh Islam sangat kuat dalam perumusan dasar negara ini. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa pada realitanya, negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, hingga aliran kepercayaan lokal yang tidak bisa lepas dalam masa perjuangan kemerdekaan negara. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam yang besar dan bersikap moderat memiliki peran penting untuk membangun *role model*, sehingga orientasi pemikiran bangsa bukan lagi pada perdebatan ideologis, melainkan pada hal teknis dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pergerakan Islam populis yang visioner bersumber dari aspirasi dan

didukung oleh kepentingan masyarakat Muslim secara luas tanpa mengesampingkan makna toleransi di negara yang plural ini. Metode dakwah dan pendidikan yang dijalankan oleh Muhammadiyah secara komprehensif dan berkelanjutan mampu membangun komitmen dan kepercayaan masyarakat mulai dari level pusat hingga ke pelosok daerah. Sementara itu, pembangunan lembaga rumah sakit, lembaga perekonomian, serta lembaga atau amal usaha lain dalam organisasi ini telah mampu menyentuh hati masyarakat luas dan menjadi basis yang kuat dalam pergerakan Islam populis yang sejatinya.

Hubungan sikap politis dan ideologis yang kuat sejauh ini mampu menjembatani politik Islam dan negara, yaitu dengan menempatkan nilai Islam yang sejalan dengan ideologi negara, dan membangkitkan kembali rasa memiliki bagi politisi Muslim terhadap berbagai persoalan negara. Hal ini mampu membuat ruang gerak mayoritas masyarakat Muslim dan negara tanpa sekat, sehingga dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang lebih kompleks. Masyarakat Muslim dapat berafiliasi dalam berbangsa dan bernegara dengan berkontribusi membentuk organisasi Islam, partai politik Islam ataupun asosiasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Muslim untuk bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses radikalisme yang menasar pada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa semakin mengancam eksistensi ideologi Pancasila, dan hal ini perlu segera ditanggulangi secara bijaksana melalui satuan pendidikan. Perguruan tinggi berbasis Islam memiliki pengaruh penting dalam penanggulangan bahaya radikalisme tersebut. Hal ini karena sifat radikal sebagaimana dijelaskan di atas lebih cenderung pada nilai-nilai Islam yang fanatik, oleh karena itu peran perguruan tinggi ini perlu mempertegas bahwa paham Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan paham Islam. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah berdasarkan pada nilai-nilai *Al-Islam* dan Kemuhammadiyah, sehingga arah orientasi lulusan mahasiswanya mengarah pada basis paham berdasarkan nilai-nilai tersebut. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai pihak pengelola dari satuan pendidikan tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara yang baik, adil dan sejahtera. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam memandang bahwa ideologi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai dalam agama Islam, serta sejalan dengan paham Muhammadiyah. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional dan lahan berdakwah serta bertajdid sejalan misi utama Muhammadiyah.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan pada simpulan penelitian di atas, maka saran dari hasil penelitian ini yang pertama adalah terdapat adanya sinergi yang perlu ditegaskan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Pancasila sebagai rumusan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syhadah* secara terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, maupun organisasi masyarakat lainnya sebagai masyarakat Islam yang mayoritas harus tetap berkomitmen pada konsep negara tersebut, dengan terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Ketiga, organisasi masyarakat Islam lainnya yang masih bersifat radikal dan ekstrim dapat bersinergi seperti yang dilakukan Muhammadiyah, dengan melakukan pendekatan politis religious, sehingga kepentingan agama Islam dalam organisasi masyarakat dapat sejalan dengan kepentingan agama lainnya dalam organisasi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adam dan Mona. 2016. *Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah: Kolaborasikan Pemikiran Pancasila sebagai Darul 'Ahdī Wa Syahadah*. Diunduh dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/6236/> pengajian-ramadhan-pp-muhammadiyah--kolaborasikan-pemikiran-
- Arif, Didik B. dan Aulia, Syifa S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdī Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics*. 14(2), 206-217.
- Bayuni, Endi. (2010). Muhammadiyah, antara Gerakan Progresif atau Konservatif. *MAARIF*, 5(1), 54-60.
- Boy, ZTF Pradana. Masa Depan Politik Kaum Islamis di Indonesia. *MAARIF*. 8(2), 38-54.
- Darraz, Muhd. Abdullah. (2013). Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *MAARIF*. 8(1)154-173.
- Effendy, Bahtiar. 2011. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project.
- Fanani, Ahmad F. (2013). Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan. *MAARIF*. 8(2), 72-95.
- Hardiman, F. Budi. 2017. *Gerakan Murka dalam Demokrasi*. Diunduh dari halaman <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/02/19534241/gerakan.murka.dalam.demokrasi>.
- Hikam, Muhammad As. 2014. *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku.
- Iskandarsjah, Eric. 2017. *Edy Suandi Hamid PTMA Pusat Keunggulan Muhammadiyah*. Diunduh dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/17/07/13/ot072o291-edy-suandi-hamid-ptma-pusat-keunggulan-muhammadiyah>.
- Istman, M.P. 2017. *Radikalisme Incar Pelajar BNPT Usul Deradikalisasi di Kurikulum*. Diunduh dalam

<https://m.tempo.co/read/news/2017/04/10/078864510/radikalisme-incar-pelajar-bnpt-usul-deradikalisasi-di-kurikulum>.

- Kholid, Idham. 2018. *Menag Minta Rektor Pastikan Perguruan Tinggi Islam Bebas Terorisme*. Diunduh dalam <https://news.detik.com/berita/4051040/menag-minta-rektor-pastikan-perguruan-tinggi-islam-bebas-terorisme>.
- Latief, Hilman. (2010). Pemerataan Kapasitas: Agenda Pimpinan Muhammadiyah Abad Ke-2. *MAARIF*. 5(1), 77-86.
- Maarif, Ahmad S. 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahbib. 2015. *Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara?* Diunduh dalam <https://www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara>.
- Matara. 2013. *Psikologi Pemuda*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.
- Muhtadi, Asep S. Menakar Gerakan Pembaruan Muhammadiyah. *MAARIF*. 5.1 (2010): 43-53.
- Mustaqim, Goris dan Tohari, Heri M. 2010. *Pemuda Membangun Bangsa dari Desa*. Bandung: Synerisia Publishing.
- Nashir, Haedar. 2007. *Kristalisasi Ideologi dan Komitmen Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. 2014. *Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Muhammad. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salim, Muhammad. 2015. Alasan NU Menerima Pancasila sebagai Asas. Diunduh pada <https://www.nu.or.id/post/read/109348/alasan-nu-menerima-pancasila-sebagai-asas->.
- Stückelberger, Christoph. 2014. *Responsible Leadership Handbook: For Staff and Boards*. Geneva: Globethics.net.

- Sudhamek. (2010). Tantangan dan Rejuvenasi Peran Strategis Muhammadiyah. *MAARIF*, 5(1), 61-70.
- Triyogo, Arkhelaus W. 2018. Penangkapan di Universitas Riau dan Radikalisme di Kampus. Diunduh dalam <https://fokus.tempo.co/read/1094969/penangkapan-di-universitas-riau-dan-radikalisme-di-kampus>.
- Ulber, Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditaman.
- Umar, Ahmad R. M. (2016). Dari ‘Negara Islam’ ke Politik Demokratis: Wacana dan Artikulasi Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 18(1), 1-18.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Widianto, Eko. 2017. *Menristek: Dosen dan Mahasiswa terlibat Radikalisme kena Sanksi*. Diunduh dalam <https://m.tempo.co/read/news/2017/05/24/173878391/menristek-dosen-dan-mahasiswa-terlibat-radikalisme-kena-sanksi>.
- Widyanto, Untung. 2017. *Populisme Islam: Militer Gunakan Islam Hantam Kaum Kiri*, pada halaman <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/23/078838920/populisme-islam-3-militer-gunakan-islam-hantam-kaum-kiri>.

## BIOGRAFI PENULIS



**Muhammad Salisul Khakim, S.IP., M.Sc.** adalah dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Laki-laki kelahiran Pekalongan pada 08 Februari 1990 ini sebelumnya menempuh pendidikan program S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan pendidikan masternya dengan Beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga program S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Ia fokus pada bidang keilmuan ketahanan nasional, dengan banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan ideologi negara dan perkembangannya dalam negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim. Dalam riwayat penelitiannya, Ia banyak mendapatkan dana hibah yang didukung dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan. Ia terus mengembangkan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya, untuk terus diintegrasikan dengan bahan dan metode pengajaran di perguruan tinggi dan pengabdian di masyarakat.

---

### **Negara Pancasila dalam Persepsi Mayoritas Islam**

ISBN: 978-602-0739-46-5

Diterbitkan oleh  
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta  
Jl. Siliwangi No. 63 Sleman, Yogyakarta 55292

ISBN 978-602-0739-46-5



Telepon: (0274) 4469199  
Fax.: (0274) 4469204  
Email: [info@unisayogya.ac.id](mailto:info@unisayogya.ac.id)  
<https://www.unisayogya.ac.id>